

BERITA ACARA EXIT MEETING
Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMN
pada Perum LKBN Antara

Pada hari ini, Kamis tanggal 4 September 2025 telah dilaksanakan *Exit Meeting* Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMN pada Perum LKBN Antara sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor PE.09.02/ST-467/PW09/4.1/2025 tanggal 16 Juli 2025, dengan hasil evaluasi terlampir.

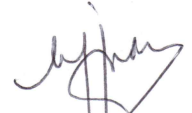
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ... September 2025

Tim Perum LKBN Antara

1. Darlim Tampubolon 
Kepala SPI
2. Purnama S Abubakar 
Manj. GCG & Penugasan Khusus
3. Bayu Aji Wahyu Kartiko 
Manj. Audit Keuangan & Operasional
4. Esti Nurmi Oktaviani 
Manj. TJSL & Komunikasi Perusahaan
5. Iwan Sahlami 
Manj. Pengadaan & Manajemen Aset
6. Dyah Sulistyorini 
Manj. Umum
7. Sarah Mawaddah Shabariyah 
Manj. Hukum dan Administrasi
8. GM Nur Lintang Muhammad 
Manj. Manajemen Risiko
9. Yudhi Mahatma 
Manj. Perencanaan Strategis & Manajemen Kinerja
10. R. Deddy Adhitya Sukma 
Manj. Perencanaan & Tata Kelola TI
11. Agus Sunarto 
Asman. Manajemen Kinerja & Kesisteman
12. Jufriadi 
Analisis Divisi Keuangan
13. Ibrahim Nuh 
Staf Manajemen Risiko
14. Abdul Hamid 
Fung. Satuan Pengawas Internal
15. Imam Budiman 
Fung. Audit Keuangan dan Operasional
16. Rahmat Aldrin W 
Fung. GCG dan Penugasan Khusus

Tim Evaluasi

1. Ujianti Purnamaningsih 
2. Herna Herawaty 
3. Bagyo Hartono Widigdo 
4. Yulinar 
5. Yoseph H. Siburian 

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan pada Perum LKBN Antara

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja dan keuangan BUMN pada Perum LKBN Antara adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Ketentuan Teknis pengelolaan BUMN (eksisting) dalam mendukung Keselarasan) dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025

Perum LKBN Antara status badannya adalah Perusahaan Umum (Perum) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah (Kementerian BUMN). Perum LKBN Antara menerima penugasan dari pemerintah dalam bentuk *Public Service Obligation* (PSO) atau Penugasan Layanan Publik. PSO ini bertujuan untuk memastikan penyebaran berita yang merata ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil, serta mendukung program-program prioritas pemerintah. LKBN Antara menerima PSO dari pemerintah sejak tahun 2008 dan sampai saat ini masih menerima penugasan tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Perum LKBN Antara bahwa terhadap semua Perum saat ini sedang dilakukan evaluasi oleh Kementerian BUMN dan melakukan peninjauan kembali terhadap bisnis BUMN yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara ditugaskan untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap BUMN. Proses perubahan status dari Perum menjadi Perseroan Terbatas (PT) sampai dengan saat ini masih menjadi bagian dari opsi transformasi. Langkah transformasi ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang memberi kewenangan bagi Danantara untuk mengelola dividen, mengarahkan modal ke sektor strategis, serta meruntuhkan sekat-sekat antar BUMN demi efisiensi.

Ketentuan teknis pengelolaan BUMN (eksisting) untuk Perum selaras dengan UU Nomor 1 Tahun 2025 karena Danantara hanya mengelola BUMN yang berbentuk PT tidak mengatur pengelolaan terhadap BUMN bentuk Perum. Namun, peluang bagi beberapa Perum untuk bergabung ke Danantara terbuka apabila statusnya berubah menjadi PT.

Akibatnya BUMN Perum tetap berada di bawah payung Kementerian BUMN dan tidak dapat langsung bergabung dengan Danantara karena Danantara adalah badan yang mengelola investasi dan aset korporasi, yang membutuhkan status PT agar bisa menginbrenkan sahamnya secara sah.

2. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMN sebagai Agen Pembangunan

a. Hasil Evaluasi atas Kinerja Keuangan BUMN

1) Kinerja keuangan BUMN Mengalami Pertumbuhan yang Baik Dan Sehat

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kinerja keuangan BUMN, kami menjumpai kondisi sebagai berikut:

Nilai Pendapatan Usaha Perum LKBN Antara periode tahun 2020 s.d. triwulan II tahun 2025 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Rp375.355.555.162,00.
- Tahun 2021: Rp411.389.802.905,00.
- Tahun 2022: Rp399.186.559.994,00.
- Tahun 2023: Rp476.981.387.052,00.
- Tahun 2024: Rp493.927.171.394,00.
- Triwulan II Tahun 2025: Rp238.217.738.471,00.

Sedangkan Nilai *Net Income* Perum LKBN Antara periode tahun 2020 s.d. triwulan II tahun 2025:

- 2020: Rp11.798.898.272,00.
- 2021: Rp16.794.181.600,00.
- 2022: Rp134.199.718.468,00.
- 2023: Rp22.772.968.153,00.
- 2024: Rp13.572.605.905,00.
- Triwulan II 2025: Rp12.465.533.304,00.

Berdasarkan informasi tersebut di atas, tren pada *Net Income* terjadi kenaikan dan penurunan yang disebabkan:

a) Kenaikan pada tahun 2022

Kenaikan pada tahun 2022 berasal dari hasil likuidasi aset PT Anpa International dimana Perum LKBN Antara sebagai perusahaan pemegang 20% saham. Posisi Perum LKBN Antara terhadap saham PT Anpa International sebagai berikut:

- Kepemilikan: Perum LKBN Antara memiliki 20% saham (30.000 lembar senilai USD 300.000,00 atau Rp124.500.000,00) di PT Anpa International;
- Asal kepemilikan: Saham tersebut berasal dari hibah seluruh penyertaan PT Antar Kencana Utama Estate Ltd (AKUEL) (entitas anak) kepada Perum LKBN Antara pada tahun 2017;

- Status saat ini: PT Anpa International telah diputuskan untuk dibubarkan melalui RUPSLB tanggal 15 Februari 2023 dan berstatus dalam likuidasi efektif tanggal 20 Februari 2023;
- Nilai investasi Perum LKBN Antara per 31 Desember 2022: Rp 658.859.452,00 setelah menerima bagian laba bersih tahun 2022 sebesar Rp139,949 miliar dan dividen Rp153,908 miliar.

Akibatnya, meskipun terjadi kenaikan *Net Income* pada tahun 2022, *Net Income* Perum LKBN Antara tidak mencerminkan peningkatan profitabilitas secara operasional.

b) Penurunan pada tahun 2024

Penurunan pada tahun 2024 disebabkan:

- Piutang usaha Perusahaan belum dihitung sesuai dengan PSAK 71. Beberapa catatan piutang yang secara klasifikasi administrasi tercatat sebagai lancar maupun macet belum sepenuhnya dievaluasi berdasarkan kualitas kredit aktual. Akibatnya untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut, Perusahaan telah membentuk akun beban penyisihan piutang sebesar Rp43.437.303.277,00 pada 31 Desember 2024.
- Perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp16 miliar untuk proses likuidasi Dana Pensiun Antara. Pembayaran tersebut digunakan untuk menutup kekurangan solvabilitas. Hal ini disebabkan nilai aset neto Dana Pensiun tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para peserta dana pensiun.

Akibatnya turunnya *Net Income* perusahaan.

Secara rata-rata dalam periode 2020 s.d. triwulan II 2025, *Net Profit Margin* LKBN Antara berada di level moderat di rentang 2,7%–5,2% (dengan mengecualikan tahun 2022). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjaga profitabilitas positif secara konsisten, meskipun dengan margin yang relatif tipis. Perlu diperhatikan bahwa margin tipis membuat perusahaan relatif rentan jika ada beban besar yang sifatnya tidak terduga.

Berdasarkan hasil Nilai Kinerja, Peringkat Akhir, dan Tingkat Kesehatan Perum LKBN Antara periode tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

- 2020: 84,07 / AA / Sehat (KAP)
- 2021: 88,25 / AA / Sehat (KAP)
- 2022: 92 / AA / Sehat (KAP)

- 2023: AA-/Stable / Sehat (PT PEFINDO)
- 2024: AA-/Stable / Sehat (PT PEFINDO)

Dalam 5 tahun terakhir, Perum LKBN Antara konsisten berada pada kategori “Sehat” meskipun terdapat fluktuasi laba bersih. Skor penilaian berkisar antara 84,07 sampai dengan 92, yang berarti masih memenuhi kategori “Sehat” sesuai dengan regulasi Pasal 81 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

Kesimpulan:

Kinerja keuangan Perum LKBN Antara secara umum berada dalam kondisi sehat dan stabil sepanjang tahun 2020 s.d. TW II tahun 2025, tercermin dari skor penilaian dan peringkat tingkat kesehatan yang konsisten pada kategori “Sehat”. Fluktuasi laba bersih dipengaruhi faktor *non-recurring* yaitu likuidasi PT Anpa International tahun 2022 dan cadangan kerugian piutang dan beban dana pensiun tahun 2024. Dengan *Net Profit Margin* moderat 2,7%–5,2%, profitabilitas terjaga walaupun margin tipis membuat perusahaan sensitif terhadap beban tak terduga. Namun, keberlangsungan usaha tetap terjamin berkat dukungan regulasi, penugasan publik (PSO), dan peran strategis sebagai kantor berita nasional.

2) Kontribusi pajak, PNPB dan Penyetoran Penerimaan Negara Lainnya oleh BUMN terhadap Keuangan Negara

Selama periode tahun 2020 - Tw II tahun 2025, nilai pendapatan usaha Perum LKBN Antara menunjukkan fluktuasi, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2020: Rp375.355.555.162,00.
- Tahun 2021: Rp411.389.802.905,00.
- Tahun 2022: Rp399.186.559.994,00.
- Tahun 2023: Rp476.981.387.052,00.
- Tahun 2024: Rp493.927.171.394,00.
- Triwulan II tahun 2025: Rp238.217.738.471,00.

Sedangkan menurut realisasi setoran pajak tahun 2020 - Triwulan II tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Tahun 2020: Rp65.736.236.797,00.
- Tahun 2021: Rp78.385.052.232,00.
- Tahun 2022: Rp93.192.398.613,00.
- Tahun 2023: Rp103.330.319.571,00.
- Tahun 2024: Rp103.579.141.682,00.

- Triwulan II tahun 2025: Rp39.843.159.953,00.

Kesimpulan:

Kontribusi Perum LKBN Antara terhadap keuangan negara melalui pembayaran pajak dapat dikatakan optimal. Hal ini tercermin dari tren realisasi setoran pajak yang terus meningkat sepanjang periode 2020-2024 dari sebesar Rp65.736.236.797,00 di tahun 2020 meningkat secara signifikan sebesar Rp103.579.141.682,00 pada tahun 2024. Tren realisasi setoran pajak periode tahun 2020 – Tw II 2025 menunjukkan kenaikan beban pajak konsisten, seiring dengan pertumbuhan pendapatan usaha dan efisiensi operasional.

3) BUMN Tidak Mempunyai Kewajiban untuk Melakukan Penyetoran Dividen Kepada Pemerintah

Kebijakan Perum LKBN Antara dalam Penggunaan Laba dan Dana Cadangan berdasarkan Pasal 84-86 PP 40/2007 yaitu:

- a) Setiap tahun buku, Perum LKBN Antara wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih sebagai dana cadangan sampai dengan mencapai paling sedikit 20% dari modal perusahaan. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% dari modal hanya dapat digunakan untuk menutupi kerugian. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20%, Menteri BUMN dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan perusahaan.
- b) Direksi harus mengelola dana cadangan agar memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- c) Penggunaan laba bersih termasuk jumlah penyisihan sebagai dana cadangan ditetapkan oleh Menteri BUMN. Menteri dapat menetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen dan/atau pembagian lain dalam bentuk tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris, bonus untuk karyawan, atau penempatan laba bersih dalam dana cadangan yang dapat diperuntukkan bagi perluasan usaha.
- d) Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perusahaan dan Perusahaan wajib menggunakan laba yang diperoleh pada tahun berikutnya untuk menutupi kerugian tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Realisasinya sesuai dengan Hasil RUPS persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan Perum LKBN Antara dalam periode Tahun Buku 2020-2024, penggunaan laba bersih digunakan sebagai berikut:

- a) Laporan Keuangan tahun 2020: seluruh laba bersih konsolidasian perusahaan sebesar Rp11.783.298.300,00 digunakan sebagai cadangan wajib.
- b) Laporan Keuangan tahun 2021: seluruh laba bersih konsolidasian perusahaan sebesar Rp7.173.164.377,00 digunakan sebagai cadangan umum dan sebesar Rp9.582.678.996,00 digunakan sebagai laba ditahan.
- c) Laporan Keuangan tahun 2022: laba bersih konsolidasian perusahaan sebesar Rp25.792.892.808 sebagai cadangan wajib dan sebesar Rp108.401.763.344 sebagai laba ditahan.
- d) Laporan Keuangan tahun 2023: seluruh laba bersih konsolidasian perusahaan sebesar Rp7.542.804.564,00 digunakan sebagai cadangan wajib dan sebesar Rp15.167.626.719,00 digunakan sebagai laba ditahan.
- e) Laporan Keuangan tahun 2024: seluruh laba bersih konsolidasian perusahaan sebesar Rp3.446.785.106,00 digunakan sebagai cadangan wajib dan sebesar Rp10.049.521.103,00 sebagai laba ditahan.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Perum LKBN Antara memiliki saldo laba total (ditentukan/ belum ditentukan penggunaannya) sebesar Rp205.579.171.038,00 (*audited*).

Kesimpulan:

Perum LKBN Antara tidak memiliki kewajiban menyetorkan Dividen kepada pemerintah dari laba perusahaan. Dalam kebijakan penggunaan laba, pembentukan dana cadangan, dan penyetoran dividen yang diatur dalam PP Nomor 40 Tahun 2007, Perum LKBN Antara menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian hanya sebagai cadangan wajib dan laba ditahan dan tidak ada keputusan untuk pembagian dividen selama 5 tahun terakhir.

4) Kebijakan Terkait *Cutloss* Atas Investasi/Proyek/Bisnis yang Merugi

Perum LKBN Antara belum memiliki kebijakan terkait *Cutloss* atas investasi/proyek/bisnis yang merugi. Kebijakan Investasi dan *Cutloss* sampai dengan saat ini sedang dalam proses penyusunan oleh Unit Manajemen Risiko.

5) Pengelolaan Aset Belum Efektif dalam Meningkatkan Daya Saing dan Profitabilitas BUMN

Perum LKBN Antara telah memiliki Manajemen Aset yang dikelola oleh Departemen Pengadaan dan Manajemen Aset (di bawah Divisi Umum dan Aset) dengan tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana tugas Divisi Umum dan Aset yang melakukan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset dan kemitraan/*partnership*. Kebijakan tersebut belum mengatur terkait Manajemen Aset Keuangan dan Aktiva Tidak Berwujud.

Berdasarkan Laporan Tahunan realisasi pelaksanaan tugas Manajemen Divisi Umum dan Aset Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- a) Departemen Pengadaan dan Manajemen Aset terus berupaya melaksanakan kontrol anggaran dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, optimalisasi aset serta kegiatan terkait manajemen kemitraan;
 - b) Memorandum Nomor 017/MO/DIR01.ANT/XII/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang *Roadmap* Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) 2024-2029 dan optimalisasi penggunaan Aplikasi PaDi BUMN dan sosialisasinya telah dilakukan melalui Zoom dengan Kepala Biro atau perwakilan di 34 Biro Provinsi;
 - c) Sosialisasi dan implementasi aplikasi pengadaan dan manajemen aset dengan realisasi Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2024 yaitu:
 - Pengadaan server *data center* oleh Divisi Teknologi informasi yang ditargetkan selesai pada Triwulan IV tahun 2024.
 - Sistem pengadaan melalui aplikasi *e-procurement* dan Simaset dalam proses pengerjaan oleh Divisi TI dan ditargetkan selesai pada Triwulan IV tahun 2025.
 - Instruksi Tim Swakelola Aplikasi *e-Procurement* dan Sistem Manajemen Aset telah terbit dan Tim segera bekerja, dengan target penyelesaian Triwulan IV tahun 2025.
 - d) Revitalisasi Aset, yakni Memorandum Nomor 014/MO/DIR01.ANT/X/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang *Roadmap* untuk Revitalisasi dan Pengembangan Aset 2023-2029. Tindak lanjut yang telah dilakukan antara lain Pendataan aset tanah dan bangunan, pendataan aset pasca renovasi Cikini dan pembangunan AHC, serta penghapusan aset.
- Kebijakan pengelolaan Manajemen Aset telah ditetapkan dengan Peraturan Direksi Nomor PER-006/DIR01.ANT/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 tentang

Kebijakan Pencatatan, Pelaporan dan Penghapusan Aset Tetap dengan Kategorisasi Aset Tetap dalam pencatatan sistem Manajemen Aset yang dimiliki oleh Perum LKBN Antara, berdasarkan jenis dan fungsinya setelah dilakukan pencatatan perolehan oleh bagian keuangan (akuntansi) dengan 4 (empat) jenis kategorisasi aset tetap Perusahaan yaitu (1) tanah (2) bangunan, (3) kendaraan, (4) inventaris dan alat kerja.

Sesuai dengan Pasal 12 yang mengatur Pendayagunaan dan Optimalisasi Aset yang diawali dengan proses pengkategorian jenis aset meliputi rusak berat, rusak ringan dan fungsional dengan dilakukan sendiri atau melalui kerjasama usaha dengan pihak lain dengan mekanisme sewa/pinjam jangka pendek/jangka panjang dan pelaksanaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. Pelaksanaannya tidak seluruhnya aset yang tidak dimanfaatkan dapat dioptimalkan. Daftar aset yang idle berdasarkan tanah & bangunan yang sudah masuk Portal BUMN per Jun 2025 adalah sebagai berikut:

No	Pusat/ Biro	Nama Aset	Alamat	Luas (m2)	Kondisi	Keterangan
1	Aceh	Tanah Rumah Dinas	Kel. Gua Gajah, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Aceh Besar	300	Rusak	Tidak Digunakan, Idle, PBB sudah lama tdk dibayarkan
2	Aceh	Bangunan R Dinas	Kel. Gua Gajah, Kec. Darul Imarah, Kota Banda Aceh, Aceh Besar	235	Rusak	Tidak Digunakan, Idle, PBB sudah lama tdk dibayarkan
3	Pusat	Tanah Mess Cibening	Bintara Jaya Bekasi Barat, Bekasi	500	Baik	Tidak Digunakan
4	Pusat	Bangunan Mess Cibening	Bintara Jaya Bekasi Barat, Bekasi	500	Rusak	Tidak Digunakan
5	Pusat	Tanah Wisma Grafika No.88	Kabupaten Bogor, Tegal Panjang, Tugu Selatan	6150	Baik	Idle, akan di renovasi dan di komersialkan
6	Pusat	Bangunan Wisma Grafika No.88	Kabupaten Bogor, Tegal Panjang, Tugu Selatan	688	Baik	Idle, akan di renovasi dan di komersialkan
7	Pusat	Tanah Wisma Grafika No.89	Kabupaten Bogor, Tegal Panjang, Tugu Selatan	730	Baik	Idle, akan di renovasi dan di komersialkan
8	Cirebon/ Jawa Barat	Tanah Kantor + Rumah Dinas	Jl. Dr Sudarsono No.39, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Cirebon	500	Baik	Tidak digunakan, Idle, Sewa baru selesai Agt 2024
9	Cirebon/ Jawa Barat	Bangunan Kantor + R Dinas	Jl. Dr Sudarsono No.39, Kel. Kesambi, Kec. Kesambi, Cirebon	165	Baik	Tidak digunakan, Idle, Sewa baru selesai Agt 2024

10	Jawa Timur	Tanah Rumah Dinas	Jl.Manukan LR 8/28 Blok O 6A, Kel.Banjar Sugihan, Kec.Tandes, Surabaya	370	Rusak	Tidak Digunakan, Idle, akan direnov per parkir
11	Jawa Timur	Bangunan R Dinas	Jl.Manukan LR 8/28 Blok O 6A, Kel.Banjar Sugihan, Kec.Tandes, Surabaya	54	Rusak	Tidak Digunakan, Idle, akan direnov per parkir
12	Atambua	Tanah Kantor	Kota Atambua, Jl. MT Haryono, Tenukik, Atambua	530	Baik	Idle, tdk digunakan, usulan utk disewakan
13	Atambua	Bangunan Kantor	Kota Atambua, Jl. MT Haryono, Tenukik, Atambua	82	Baik	Idle, tdk digunakan, usulan utk disewakan

Optimalisasi Aset yang telah dilakukan adalah untuk 3 kajian atas kegiatan renovasi gedung Pasar baru, pembelian tanah dan bangunan di Cisarua, dan pembangunan rumah toko.

Hal ini disebabkan perusahaan belum memiliki mekanisme/SOP yang memuat alur pemanfaatan aset secara teknis dan rinci.

Akibatnya masih terdapat aset yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Rekomendasi:

Membuat petunjuk teknis atau SOP atas jabaran PER-006/DIR01.ANT/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 Pasal 12 terkait dengan pendayagunaan dan optimalisasi Aset yang memuat alur pemanfaatan aset secara teknis dan rinci, serta membuat rencana yang akan dilakukan terkait optimalisasi asset perusahaan.

b. Hasil Evaluasi atas Kinerja Operasional

1) Pemenuhan Capaian KPI Operasional Selaras dengan Kondisi Keuangan dan Operasional Perusahaan

Pemenuhan nilai skor KPI korporat 2024 tidak mencapai target yaitu 97,48 dari target 100.

Capaian KPI Finansial:

a) EBITDA: Target Rp37,78 miliar → Realisasi Rp59,66 miliar (158%).

b) ROIC $\geq$ WACC: Target -4,11% → Realisasi -3,32% (124%).

Return on Invested Capital (ROIC) tercatat lebih rendah dari *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) tidak tercapai.

Hal ini disebabkan:

- Piutang usaha Perusahaan belum dihitung sesuai dengan PSAK 71. Beberapa catatan piutang yang secara klasifikasi administrasi tercatat sebagai lancar maupun macet belum sepenuhnya dievaluasi berdasarkan kualitas kredit aktual. Akibatnya untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat tidak tertagihnya piutang tersebut, Perusahaan telah membentuk akun beban penyisihan piutang sebesar Rp43.437.303.277,00 pada 31 Desember 2024;
- Perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp16 miliar untuk proses likuidasi Dana Pensiun Antara. Pembayaran tersebut digunakan untuk menutup kekurangan solvabilitas karena nilai aset neto Dana Pensiun tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para peserta dana pensiun.

c) *Interest Bearing Debt to EBITDA*: Target 1,57x → Realisasi 0,71x (221%).

d) *Interest Bearing Debt to Invested Capital*: Target 13,82% → Realisasi 13,55% (102%).

Hasil capaian KPI Tahun 2024 menunjukkan adanya komponen yang perlu menjadi perhatian khusus, yaitu dari sisi profitabilitas, terutama pada ROIC terhadap WACC. Realisasi capaian ROIC terhadap WACC masih di bawah target. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan modal untuk menghasilkan laba belum optimal. Kondisi ini perlu dipahami dalam konteks bentuk hukum LKBN Antara sebagai Perusahaan Umum (Perum) yang memiliki mandat pelayanan publik. Sebagian besar aktivitas perusahaan tidak semata-mata diarahkan untuk menghasilkan keuntungan finansial, melainkan untuk menjalankan

fungsi sebagai kantor berita nasional. Akibatnya, margin usaha yang diperoleh cenderung tipis dan tingkat pengembalian modal (ROIC) lebih rendah dibanding biaya modal (WACC).

Beberapa KPI Operasional yang perlu menjadi perhatian:

- a) Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan: Target Rp6 miliar → Realisasi Rp594,89 juta (10%).

Hal ini disebabkan proses monetasi baru mulai berjalan di tengah tahun.

Akibatnya waktu pelaksanaan terbatas untuk menghasilkan pendapatan sesuai proyeksi.

- b) Rasio *Top Talent* Muda (<42 tahun) Dalam *Nominated Talent*: Target 30%→ Realisasi 0%.

- c) Rasio Perempuan Dalam *Nominated Talent*: Target 30%→ Realisasi 0%.

Ketidaktercapaian ini disebabkan perusahaan masih berada pada tahap pencarian *talent* muda dan belum ada kandidat yang memenuhi kriteria untuk masuk dalam kelompok *nominated talent* Muda dan *nominated talent* perempuan.

Akibatnya Perum LKBN Antara tidak memenuhi ketentuan dalam Aspirasi Pemegang Saham (APS) Kementerian BUMN mengenai *Updating Talent* dan *Succession Management*.

Kesimpulan:

Secara keseluruhan, capaian KPI korporat LKBN Antara tahun 2024 dengan skor 97,48 dari target 100 menunjukkan kinerja perusahaan berada pada kategori baik, namun ketercapaian KPI operasional belum sepenuhnya selaras dengan kinerja finansial. Meskipun EBITDA berhasil melampaui target (158%) dan mencerminkan efisiensi operasional yang positif, profitabilitas masih lemah karena ROIC tercatat lebih rendah daripada WACC (-3,32%). Selain itu, monetisasi aset hanya mencapai 10% dari target, yang mengindikasikan bahwa strategi diversifikasi dan optimalisasi aset belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan perusahaan.

Berikut ini rekapitulasi penilaian KPI Perum LKBN Antara tahun 2024.

Nomor		Uraian	Satuan	Bobot	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Nilai Capaian Tahun 2024	Capaian Nilai Skor KPI Tahun 2024	Skor KPI Tahun 2024
Perspektif	Indikator								
I.	NILAI EKONOMI UNTUK INDONESIA								
	1.	Finansial EBITDA	Rp Miliar	7,00	37,78	59,66	158%	11,05	7,70
	2.	ROIC >= WACC	%	4,00	(4,11)	(3,32)	124%	4,95	4,40
	3.	Interest Bearing Debt to EBITDA	x	6,00	1,57	0,71	221%	13,27	6,60
	4.	Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	4,00	13,82	13,55	102%	4,08	4,08
	Operasional								
	5.	Peningkatan Produksi Berita Cegah Hoax Dalam Tahun Pemilu	Jumlah Berita	7,00	400	469	117%	8,21	7,70
	6.	Tingkat Keterbacaan Portal antaranews.com	Jumlah Pageview	7,00	80.000.000	150.117.596	188%	13,14	7,70
	Sosial								
	7.	Peningkatan Kompetensi Jurnalistik	Jumlah Peserta	5,00	150	234	156%	7,80	5,50
	8.	Tingkat Kelulusan Produk Berita PSO	%	10,00	80	100,00	125%	12,50	11,00
		Jumlah Nilai Ekonomi Untuk Indonesia		50,00					54,68
II.	INOVASI MODEL BISNIS								
	9.	Pelaksanaan Monetasi Aset Perusahaan	Rp Miliar	3,00	6.000.000.000	994.890.000	10%	0,30	0,30
	10.	Sustainability Antara ETP Melalui Penambahan Jumlah Transaksi	%	5,00	15	46,10	307%	15,37	5,50
	11.	Sinergi Bisnis antara Anggota Klaster	Jumlah Sinergi	3,00	1	1,00	100%	3,00	3,00
	12.	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Manajemen Risiko	%	4,00	100	92,00	92%	3,68	3,68
		Jumlah Inovasi Model Bisnis		15,00					12,48
III.	KEPEMIMPINAN TEKNOLOGI								
	13.	Penyelesaian Gap INDI 4.0	%	6,00	25	25,00	100%	6,00	6,00
	14.	Penerapan ERP di Perusahaan	%	7,00	75	77,00	103%	7,19	7,19
		Jumlah Kepemimpinan Teknologi		13,00					13,19
IV.	PENINGKATAN INVESTASI								
	15.	Pengembangan Infrastruktur Aset Digital (Antara Media Sosial)	%	3,00	15	146,00	973%	29,20	3,30
	16.	Persentase Penyerapan Investasi	%	4,00	70	96,11	137%	5,48	4,40
		Jumlah Pengembangan Investasi		7,00					7,70
V.	PENGEMBANGAN TALENTA								
	17.	Rasio Top Talent Muda (<42 tahun) Dalam Nominated Talent	%	3,00	30	-	0%	0,00	-
	18.	Rasio Perempuan Dalam Nominated Talent	%	3,00	30	-	0%	0,00	-
	19.	Rasio Pemenuhan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko (Rasio Kualifikasi)	%	5,00	90	90,57	101%	5,03	5,03
	20.	Implementasi Tindak Lanjut Roadmap Dana Pensiun	%	4,00	50	70,00	140%	5,60	4,40
		Jumlah Pengembangan Talenta		15,00					9,43
		Jumlah		100,00					97,48

2) Hasil pengukuran tata kelola perusahaan yang baik (GCG) tidak selaras dengan

kondisi keuangan dan operasional BUMN

Daftar skor hasil asesmen atas penerapan GCG tahun 2020-2024:

- Tahun 2020: 81,027 (BPKP).
- Tahun 2021: 83,16 (*Self Assessment*).
- Tahun 2022: 82,408 (BPKP).
- Tahun 2023: 83,958 (*Self Assessment*).
- Tahun 2024: Belum dilakukan penilaian.

Dari hasil pengukuran tersebut, skor *assessment* GCG Perum LKBN Antara secara konsisten berada pada kisaran skor 81–83, dengan kategori “Baik”.

Return on Asset (ROA):

- Tahun 2020: 4,37%.
- Tahun 2021: 6,08%.
- Tahun 2022: 34,08%.
- Tahun 2023: 5,26%.
- Tahun 2024: 3,12%.
- Tw II 2025: 2,47%.

Return on Equity (ROE):

- Tahun 2020: 18,54%.
- Tahun 2021: 21,53%.
- Tahun 2022: 149,86%.
- Tahun 2023: 9,54%.
- Tahun 2024: 5,12%.
- Tw II 2025: 4,47%.

Net Profit Margin (NPM):

- Tahun 2020: 3,14%.
- Tahun 2021: 4,08%.
- Tahun 2022: 33,62%.
- Tahun 2023: 4,77%.
- Tahun 2024: 2,75%.
- Tw II 2025: 5,23%.

Penurunan signifikan ROA/ROE/NPM pada tahun 2023 dan 2024 disebabkan adanya penurunan aset atas piutang dari perhitungan cadangan piutang tidak

tertagih (PSAK 71) dan *Corporate Action* atas pembubaran Dana Pensiun yang berdampak pada perhitungan imbal pasca kerja selama 2 tahun.

Dari sisi keuangan, indikator yang digunakan antara lain ROA, ROE, *Net Profit Margin* (NPM). Hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja keuangan Perum LKBN Antara masih berfluktuasi dan cenderung menurun, dengan anomali lonjakan pada tahun 2022 akibat pengakuan pendapatan non-operasional dari likuidasi aset.

Di samping itu, hasil *assessment* terhadap penerapan GCG menunjukkan bahwa masih terdapat prinsip-prinsip *governance* yang belum sepenuhnya diimplementasikan oleh Perum LKBN Antara, antara lain:

Direksi belum optimal dalam melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan perusahaan, terlihat dari kondisi berikut yaitu: Perusahaan belum mengesahkan Pedoman/Kebijakan terkait pelaksanaan dan pelaporan sistem pengendalian Internal berbasis COSO yang memuat unsur: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pelaporan, serta ada penegasan bahwa Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan.

Hal ini disebabkan Perusahaan belum menyusun pedoman Sistem Pengendalian Intern.

Akibatnya potensi terjadinya risiko kecurangan seperti penggelapan aset dan manipulasi laporan keuangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang dapat menimbulkan sanksi, serta inefisiensi operasional karena kurangnya pengawasan dan kendali atas proses bisnis.

Kesimpulan:

Skor GCG Perum LKBN Antara dari tahun 2020 s.d 2023 berkisar antara 81–s.d. 83 konsisten pada kategori “Baik”, namun belum sepenuhnya selaras dengan kinerja keuangan maupun operasional, karena perusahaan belum memiliki kebijakan sistem pengendalian intern.

3) Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko BUMN belum Berada pada Fase yang Baik

Hasil Penilaian *Risk Maturity Index* 3 tahun terakhir (internal & eksternal) sebagai berikut:

- 2022: 3,42 (*Self Assessment*)
- 2023: 2,63 (BPKP)
- 2024: Belum dilakukan penilaian

Capaian Hasil Penilaian *Risk Maturity Index* Tahun 2023 masih berada di bawah rentang skor 2,9 - 3,8 (Fase Praktik yang Baik).

Hal ini disebabkan antara lain Perusahaan belum menyusun kebijakan peta peran yang memisahkan lini pertama, lini kedua, dan lini ketiga dalam penerapan manajemen risiko perusahaan.

4) Hasil Kinerja Audit Internal Belum Cukup Memberikan Dampak Perbaikan Kinerja Korporasi

Sepanjang tahun 2024, Divisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) Perum LKBN Antara telah melaksanakan peran pengawasan internal melalui koordinasi lintas unit, monitoring, dan pemberian rekomendasi.

Berdasarkan Laporan Manajemen Divisi SPI Perum LKBN Antara Tahun 2024, terdapat beberapa hal krusial terkait persoalan strategis perusahaan yang belum ditindaklanjuti oleh unit terkait antara lain piutang macet sebesar Rp143 miliar sejak tahun 2019, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil Audit BPK atas pengelolaan keuangan tahun 2016 s.d. 2018 yang belum selesai, penyelesaian piutang PNRI sebesar Rp11 miliar, penyelesaian jasa produksi, pertanggungjawaban biaya operasional usaha portal Biro Jabar dan Jatim.

Hal ini disebabkan Kapasitas dan kapabilitas SPI belum memadai dan Divisi-Divisi lain belum memiliki KPI terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan internal

maupun eksternal dan belum ada kebijakan penerapan sanksi terkait tindak lanjut yang belum dilakukan.

Akibatnya, SPI belum optimal dalam memberikan hasil pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian KPI perusahaan serta perbaikan kinerja korporasi.

Kesimpulan:

Kinerja Divisi SPI Perum LKBN Antara pada tahun 2024 belum cukup memberikan dampak perbaikan signifikan terhadap kinerja korporasi dan keuangan. Hal ini disebabkan fokus pengawasan belum sepenuhnya diarahkan pada aspek strategis yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian KPI perusahaan, seperti profitabilitas, efisiensi biaya, dan optimalisasi aset. Di samping itu, tindak lanjut manajemen atas rekomendasi SPI belum diukur secara sistematis, sehingga efektivitasnya dalam mendorong perbaikan kinerja korporasi belum dapat dievaluasi secara optimal.

Rekomendasi:

1. Menetapkan KPI pada masing-masing Divisi atas tindak lanjut hasil pengawasan internal maupun eksternal;
2. Membuat kebijakan penerapan sanksi terkait tindak lanjut yang belum dilakukan;
3. Meningkatkan Kapasitas dan kapabilitas SPI dengan melakukan penilaian IACM (*Internal Audit Capacity Model*).

5) Terdapat Kelemahan dalam Sistem Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan (Penerapan *Internal Control over Financial Reporting* (ICoFR))

Perum LKBN Antara telah melakukan diagnostik ICoFR Perum LKBN Antara oleh Konsultan Parker-Russell Indonesia. Pelaksanaan dimulai dengan *Kick-off meeting* dalam rangka perbaikan tata kelola perusahaan pada tanggal 7 Mei 2024 dan berakhir 23 Juli 2024. Atas Tindak lanjut Laporan Diagnostik ICoFR Perum LKBN Antara dengan Nota Dinas Nomor HK.00/046/DEWAS/IX/2024 maka dibentuk Tim Pengawas Implementasi Inisiatif Perbaikan ICOFR dengan surat Nomor INST-059/DIR01.ANT/IX/2024, dengan tujuan untuk mengawasi tindak lanjut atas Gap dan inisiatif perbaikan dari kegiatan Diagnostik ICoFR Perum LKBN Antara yang dilakukan oleh KAP Parker Russel Indonesia dengan cara yang terstruktur dan sistematis, serta memastikan bahwa semua langkah telah diambil untuk

memperbaiki kelemahan yang ditemukan dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal Perusahaan. Tindak lanjut atas kelemahan tersebut antara lain Menyusun SOP hak akses (*User Access Matrix*) sesuai dengan *segregation of Duty*, Menyusun kebijakan *anti-fraud* beserta peta perannya, Menyusun rencana kerja tahunan TI, dan Melaksanakan *quality assurance review* dengan pihak independen eksternal yang dimuat dalam Laporan Perbaikan ICOFR Perum LKBN Antara untuk tahun 2024 dengan Nomor 001/ND/ICOFR/XII/2024.

Sesuai dengan Hasil Monitoring Pemenuhan Gap ICoFR masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti, namun telah dibuat *roadmap* penyelesaian tindak lanjutnya.

Hal ini disebabkan lemahnya pengendalian perusahaan, keterbatasan atas sumber daya, serta kegagalan dalam mengidentifikasi dan mengelola sistem keuangan Perum LKBN Antara.

Akibatnya laporan keuangan perusahaan bisa jadi tidak informatif, tidak akurat, tidak lengkap, dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Pihak Perum LKBN Antara telah menanggapi dalam penyelesaian pemenuhan gap ICoFR:

1. Menyusun SOP hak akses (*User Access Matrix*) sesuai dengan *segregation of Duty* => sudah dibuat SOP dimaksud beserta diagram alurnya dan telah dikirim ke Dep. Man Risk
2. Menyusun kebijakan *anti-fraud* beserta peta perannya => kebijakan *anti-fraud* berlaku untuk semua sistem yang ada di perusahaan. Untuk Divisi TI telah mengimplementasikan TFA (*Two Factor Authenticator*) seperti GA dan OTP, guna memastikan pengguna yang masuk merupakan pengguna yang sah sesuai Nota Dinas no.TI.13.00/035/DIV06.ANT/IX/2024. Selain itu Pengaturan Hak Akses Modul dan Hak Akses Aksi (CRUD) sudah diterapkan di semua sistem serta diberlakukan SOP hak akses (*User Access Matrix*) sesuai dengan *segregation of Duty*
3. Menyusun rencana kerja tahunan TI => sudah menyusun Renstra TI 2025 dan telah dikirimkan ke Dep. Man Risk
4. Melaksanakan *quality assurance review* dengan pihak independen eksternal => TI sudah melakukan pemilihan vendor-vendor yang akan melaksanakan hal ini (Sertifikasi ISO 27001 serta mengukur tingkat kedewasaan TI (*IT Maturity level*) yang terakhir dilaksanakan tahun 2022 dan masih menunggu keputusan

Manajemen/ BOD untuk pelaksanaannya.

Kesimpulan:

Penerapan sistem pengendalian internal yang terstruktur untuk memastikan laporan keuangan perusahaan disusun secara akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (penerapan ICOFR), Perum LKBN Antara telah melakukan diagnostik ICOFR Perum LKBN Antara oleh Konsultan Parker-Russell Indonesia.

Rekomendasi:

1. Perum LKBN Antara menetapkan Peta Jalan Implementasi ICoFR sesuai dengan ketentuan dalam S-6/DKU.MBU/02/2025 tentang penetapan Peta jalan Implementasi ICoFR dan Petunjuk Teknis nya sesuai dengan SK-5/DKU.MBU/11/2024;
2. Menindak lanjuti Hasil Monitoring Pemenuhan Gap ICoFR masih terdapat permasalahan yang belum ditindaklanjuti, sesuai dengan *roadmap* penyelesaian tindak lanjutnya.

6) Permasalahan Hukum dan Pelanggaran Terhadap Regulasi Industri yang Berdampak Menghambat Operasional dan Pencapaian Kinerja Perusahaan

Dalam *Annual Report* Tahun 2020 - Perkara Penting yang Dihadapi Perusahaan (halaman 127):

- a) Perum LKBN ANTARA melakukan penyelesaian terhadap kasus hukum hubungan industrial pada kasus Perselisihan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) untuk karyawan PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) yang diberhentikan pada 30 Desember 2018.
- b) Perum LKBN ANTARA menghadapi Perkara Hukum Perselisihan Hubungan Industrial di tahun 2020 pada kasus Perselisihan PHK untuk 11 orang karyawan PKWT yang diberhentikan pada tanggal 31 Januari 2019.
- c) Perum LKBN ANTARA menghadapi kasus perselisihan Hubungan Industrial tentang mutasi 4 orang karyawan.

Permasalahan hukum ini menunjukkan pola yang berulang dalam aspek ketenagakerjaan karena perbaikan manajemen SDM dan hubungan industrial belum berjalan optimal.

Meskipun perkara hukum tersebut tidak secara langsung mengancam keberlangsungan usaha (*going concern*) perusahaan, namun risiko yang ditimbulkan tetap signifikan. Kasus hukum yang berkepanjangan dapat:

Perum LKBN Antara selama tahun 2020 s.d. TW II Tahun 2025 tidak memiliki program restrukturisasi perusahaan dalam rangka penyehatan BUMN untuk menghasilkan perbaikan kinerja keuangan dan operasional.

4. Evaluasi atas Dampak Penyelenggaraan BUMN dalam Menghasilkan Nilai Tambah Perekonomian

a. Hasil Evaluasi atas Pelaksanaan Penugasan Pemerintah

1) Infrastruktur BUMN dalam mendukung penugasan masih terbatas (jumlah, integrasi, sebaran, kualitas)

LKBN Antara telah memiliki:

- a) SK Kementerian Kominfo RI Nomor 154 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penugasan Pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 yang menetapkan penugasan pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Negara Antara. Dan penugasan pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- b) SK Kuasa Pengguna Anggaran Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang Pers Nomor 2 Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024 Tentang Penetapan Harga Produk Dan Konstruksi Program Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 yang menetapkan harga produk dan konstruksi program kewajiban pelayanan publik untuk informasi publik bidang pers Tahun Anggaran 2024;
- c) Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dan Perum LKBN ANTARA dengan Nomor: 03/MOU/DJKP/HK.04.02/03/2024 dan Nomor: HK.08.00/006/DIR01.ANT/PKS/2024 tanggal 25 Maret 2024 tentang Teknis Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Informasi Publik Bidang PERS TA 2024; dan
- d) Tim Pengelola Pelaksana PSO sudah ada dalam struktur organisasi perusahaan dengan Peraturan Direksi Perum LKBN Antara Nomor PER-011/DIR01.ANT/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perum LKBN Antara halaman 25.

Rencana PSO sudah dimuat dalam RKAP Tahun 2020 s.d. 2024 dan untuk tahun 2024 telah dimuat pada halaman 28. Analisis Kebutuhan untuk Tahun 2025 telah diverifikasi oleh Inspektorat Kementerian Komdigi. Nilai perjanjian untuk pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp176.322.920.000,00 dengan Jumlah Kuota Produk sebanyak 170.985. Penyampaian laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers kepada Pihak Kesatu berupa laporan bulanan, laporan semester, dan laporan tahunan, yang memuat paling sedikit capaian produksi dan capaian distribusi.

Dari Laporan Pelaksanaan PSO Tahun 2024 dengan Nomor B/DIR01.ANT/HM01.06/282/I/2025 tanggal 30 Januari 2025, alokasi dana untuk penugasan PSO Bidang PERS Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp176.322.920.000,00 telah terserap 100%.

Seluruh inventaris infrastruktur sudah mendukung pelaksanaan penugasan pemerintah yang dibiayai dari PSO.

Pengawasan terhadap pelaksanaan PSO telah dilakukan oleh SPI, hasil pengawasan dimuat dalam laporan tahunan divisi SPI.

RJPP telah memuat pelaksanaan PSO, yang dimuat dalam halaman 118.

Kesimpulan:

Infrastruktur Perum LKBN Antara telah mendukung penugasan dengan pelaksanaan PSO yang didukung dengan Surat Keputusan Kementerian Kominfo, dan telah selaras dengan RKAP dan RJPP.

2) BUMN Memiliki Modal yang Cukup untuk Mengeksekusi Penugasan

Pelaksanaan penugasan pemerintah Perum LKBN Antara berdasarkan SK Kementerian Kominfo RI Nomor 154 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penugasan Pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 yang menetapkan penugasan pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Negara Antara. Dan penugasan pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Perum LKBN Antara telah melakukan kajian/strategi pembiayaan penugasan pada bulan Februari 2025 yaitu skema penambahan utang untuk mengatasi kesulitan *Cash Flow* menunggu realisasi PSO.

Tim Pelaksana PSO telah menyusun laporan pelaksanaan penugasan secara periodik yaitu bulanan, semesteran dan tahunan

LKBN Antara sudah menganalisa risiko terkait PSO, yang mana risiko PSO tersebut masuk ke dalam risiko utama perusahaan, antara lain:

- a) pengelolaan tata kelola yang terlambat;
- b) beban produksi yang terlalu tinggi; dan
- c) keterlambatan untuk pelaksanaan PSO.

Kesimpulan:

Perum LKBN Antara telah memiliki modal yang cukup untuk mengeksekusi penugasan yang bersumber dari PSO. Sementara untuk mengatasi permasalahan *Cash Flow*, Perum LKBN Antara membuat kajian pembiayaan penugasan tersebut dengan menambah utang.

3) Pelaksanaan Penugasan Telah Menghasilkan Dampak yang Diharapkan Sesuai Tujuan Pemberian Penugasan

Pelaksanaan penugasan telah menghasilkan dampak yang diharapkan sesuai tujuan pemberian penugasan yaitu memberi landasan kerja sama dalam teknis pelaksanaan program Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin terlaksananya program Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024. Hal tersebut terlihat dari realisasi capaian KPI sebesar 100% yang tercantum dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan PSO.

Laporan kegiatan pengawasan atas PSO yang dilakukan oleh SPI belum disusun secara khusus. Namun, telah dimuat dalam Laporan Manajemen Tahunan Divisi SPI Tahun 2024 dan *draft Annual Report* Tahun 2024.

Hal ini disebabkan sistem pengendalian internal perusahaan lemah, ini dapat menyebabkan kesulitan dalam menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu, baik untuk pengawasan internal maupun untuk penyusunan laporan keuangan tahunan dan kurang menyadari pentingnya audit internal dan eksternal sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Akibatnya ketidakmampuan untuk mengevaluasi keberhasilan penugasan, risiko terhadap penyelewengan dan pemborosan anggaran, serta ketidakpastian akan pemenuhan standar kualitas dan kepatuhan terhadap peraturan. Hasil pengawasan penting untuk mengkomunikasikan hasil dan mendorong perbaikan kinerja serta tata kelola perusahaan yang baik.

4) Penyelenggaraan Penugasan Tidak Menimbulkan Risiko Penurunan Kinerja BUMN

Penyelenggaraan penugasan dari pemerintah berupa PSO periode 2020 s.d. 2024 tidak menimbulkan penurunan kinerja perusahaan karena Perum LKBN Antara menerima pembiayaan dari pemerintah berupa PSO.

b. Hasil Evaluasi atas Dukungan Program Prioritas

1) Perencanaan Investasi BUMN dalam Pemenuhan Capaian Program Prioritas

Perum LKBN Antara tidak mempunyai Program Prioritas Nasional, namun diberikan penugasan oleh pemerintah berdasarkan SK Kementerian Kominfo RI Nomor 154 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penugasan Pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 yang menetapkan penugasan pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers Tahun Anggaran 2024 kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Negara Antara.

2) Kapasitas BUMN Dalam Menjalankan Program Prioritas (Infrastruktur, Permodalan, Kebijakan/prosedur)

Perum LKBN Antara tidak mempunyai Program Prioritas Nasional, namun diberikan penugasan oleh pemerintah berdasarkan SK Kementerian Kominfo RI Nomor 154 Tahun 2024 tanggal 20 Februari 2024 tentang Penugasan Pelaksana Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers TA 2024 yang Menetapkan penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Informasi Publik Bidang Pers TA 2024 kepada Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita Negara Antara.

3) Realisasi Belanja Modal *Capital Expenditure* (CAPEX) BUMN Tidak Efektif dan Tidak Ditujukan Untuk Penguatan Industri

Realisasi penyerapan CAPEX dari tahun 2020 s.d. Triwulan II Tahun 2025 sebesar 67,30% dari rencana yang dimuat dalam RKAP tahun 2020 s.d. Triwulan II Tahun 2025.

Dalam realisasi penyerapan CAPEX dari tahun 2020 s.d. Triwulan II Tahun 2025 hanya ada 3 kajian untuk kegiatan renovasi gedung Pasar baru, pembelian tanah dan bangunan di Cisarua, dan pembangunan rumah toko, untuk pengadaan tanah, bangunan dan inventaris yang lain belum dilakukan kajian.

Hal ini disebabkan adanya hambatan dalam penyerapannya yaitu Legalitas dan Perizinan, Proses pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan kendaraan, dan Perizinan dan Kajian dan Perum LKBN Antara belum memiliki kebijakan optimalisasi aset dan hanya sebagian kecil perusahaan melakukan kajian dan analisis kelayakan penetapan CAPEX.

Akibatnya yaitu terhambatnya pertumbuhan bisnis, inefisiensi operasional, dan inefisiensi dalam penggunaan aset yang berdampak pada peningkatan biaya dan penurunan pendapatan.

4) Kontribusi BUMN Terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perum LKBN Antara belum membuat Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan Laporan *Environment, Social, and Governance* (ESG), namun perusahaan telah membuat Laporan Realisasi Tanggung Jawab sosial dan Lingkungan (TJSL) selama 5 tahun.

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan (*Audited*) Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan Laporan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun Buku 2020 s.d 2024 dapat dilihat realisasi penyaluran TJSL dibandingkan dengan target RKAP. Realisasi TJSL korporasi telah disalurkan dalam bentuk Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil, *Community Involvement and Development* (CID) dan Non CID. Dan nilai realisasi TJSL tersebut secara *branding* telah mendukung bisnis inti dengan bekerja sama dengan universitas, namun secara ekonomi belum memberi pengaruh secara langsung kepada korporasi. Adapun penyaluran TJSL dalam bentuk:

- a) Peningkatan kompetensi jurnalistik sebanyak 199 mahasiswa.
- b) Pelatihan mahasiswa dan komunitas sebanyak 125 mahasiswa.
- c) Literasi Media sebanyak 384 mahasiswa.

d) Kolaborasi bantuan pendidikan sebanyak 100 orang.

e) Bantuan bencana alam sebanyak +/- 700 orang.

f) Pembuatan fasilitas umum berupa taman sebanyak 1 unit.

g) Penanaman pohon sebanyak 50 tanaman pohon.

Penyusunan dan perencanaan program TJSL pada LKBN Antara telah mengacu kepada PER-1/MBU/03/2023 tanggal 26 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Bappenas. Aspeknya seperti pilar dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta menggunakan metadata indikator SDGs dalam aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditentukan oleh Bappenas (3 pilar) dan Realisasi program TJSL telah sesuai dengan indikator SDGs untuk CID (3 pilar) yaitu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, dan untuk Non CID yaitu Hukum dan Tata Kelola.

Dalam penyaluran TJSL tidak menemui adanya hambatan dan telah sesuai dengan indikator SDGs dari Bappenas.

Penyebab Perum LKBN Antara belum membuat Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) dan Laporan ESG karena Perum LKBN Antara belum memiliki Komite/Unit yang terkait dengan pengelolaan ESG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi dan belum sepenuhnya berkomitmen program pengelolaan ESG.

Akibatnya kehilangan kesempatan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang perusahaan melalui keberlanjutan bisnis dengan cara mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam operasional bisnis meliputi manajemen risiko non-keuangan, peningkatan efisiensi operasional, peningkatan reputasi dan citra perusahaan, daya tarik bagi investor dan mitra bisnis, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Kesimpulan:

Dalam penyaluran TJSL tahun 2024 LKBN Antara tidak ditemukan hambatan, TJSL tahun 2024 telah 100% disalurkan sesuai dengan rencana (RKAP), penyaluran telah mengacu kepada SDGs Bappenas (tiga pilar), realisasi TJSL secara *branding* telah mendukung bisnis inti, namun secara ekonomi belum memberi pengaruh secara langsung kepada korporasi, serta belum ada Komite Pengelola ESG.

Rekomendasi:

Perum LKBN Antara membuat Laporan Keberlanjutan sesuai dengan standar yang menjadi acuan di Indonesia antara lain dengan Standar IFRS S1 yaitu standar global dari *International Sustainability Standards Board* (ISSB) yang mengatur persyaratan umum untuk pengungkapan informasi keuangan terkait keberlanjutan, mencakup topik ESG (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) secara luas.